



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ATENG HARTONO**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **201735**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.965.000.000**

1. Tanah Seluas 3320 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 3320 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/16 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 874 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 746 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
10. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
11. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
12. Tanah Seluas 827 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL



SENDIRI Rp. 425.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	108.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	286.045.097
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.361.945.097
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.361.945.097

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.